



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS TENAGA KERJA**



A large decorative graphic is positioned at the bottom of the page. It consists of three overlapping triangles: a teal triangle on the left, a grey triangle on the right, and a lime green triangle at the bottom. All triangles have white outlines.

**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBULAN I
TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LAMONGAN**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS TENAGA KERJA

Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 63 Telp/Fax : (0322) 316147
e-mail : disnaker@lamongankab.go.id website : www.lamongankab.go.id

| | | |
|-----------------------|---|---------|
| NO DOKUMEN | : | |
| TANGGAL TERBIT | : | 5df 888 |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Disiapkan Oleh | : | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi <u>HARTONO, S. Sos</u> NIP. 19691002 199703 1 005 |
| Diperiksa | : | Sekretaris Dinas Tenaga Kerja <u>ADANG MOELYONO, S.H., M.Kn</u> NIP. 19760216 200312 1 002 |
| Disahkan Oleh | : | Kepala Dinas Tenaga Kerja <u>AGUS CAHYONO, S.E., M.Si.</u> NIP. 19650808 199503 1 002 |

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artikata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negative dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yang meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumber daya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan. Maka dari pada itu setiap Instansi Pemerintah diharuskan melakukan penilaian resiko (risk assessment) dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis resiko dalam tugas dan fungsinya.

Upaya tersebut tidaklah mudah dan perlu adanya kontribusi dari semua unsur yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan pada setiap level untuk menjalankan fungsinya masing – masing dengan baik. Disamping itu, setiap aktifitas yang dilakukan tidak terlepas dari adanya resiko yang dapat berpengaruh dalam pencapaian tujuan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, upaya implementasi management resiko Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan perlu dikembangkan lebih lanjut.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya;
- Identifikasi risiko;
- Analisis risiko;
- Evaluasi risiko;
- Pengendalian risiko;
- Pemantauan dan telaah ulang;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tribulan I sebagaimana terlampir:

**Formulir Kertas Kerja Rencana Monitoring Pi
Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lamongan
 Tahun Penilaian : 2023
 Urusan Pemerintahan : Tenaga Kerja
 Dinas Terkait : Dinas Tenaga Kerja

| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan | Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan | Penanggung Jawab Pemantauan | Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan | |
|----|---------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|--|
|----|---------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|--|

Risiko Strategis OPD Dinas Tenaga Kerja:

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------------|---|--|--|
| 1 | 1. Meningkatkan Program Pelatihan yang telah diadakan dan menambah kuota peserta pelatihan 2. Kerjasama dengan OPD Terkait untuk memfasilitasi penduduk yang bekerja 3. Pelaksanaan Job Fair | 1. Melaksanakan Monev atas Program Pelatihan yang telah diadakan 2. Terus berkoordinasi dengan OPD Terkait 3. Melaksanakan Monev kegiatan Job Fair | Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sekretaris, Kabid | Januari-Desember 2023 | 1.Tribulan I-IV 2.Tribulan I-IV 3. Tribulan III | Sudah dilaksanakan 1. Pelatihan di Tribulan I 2. Koordinasi dengan OPD Terkait Tribulan I 3. Belum terlaksana | |
|---|--|--|--|-----------------------|---|--|--|

Risiko Operasional OPD Dinas Tenaga Kerja:

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|
| 1 | UJK BNSP yang tidak terkafer Dana APBD bisa di usulkan ke dana APBN BPVP Sidoarjo | Evaluasi dan Koordinasi | Kabid Pelatihan Kerja | Januari-Desember 2023 | UJK BNSP APBD 1.Tribulan I 2.Tribulan II 3. Tribulan III 4. Tribulan IV | Sudah dilaksanakan UJK BNSP APBD 1. Menjahit 1 dan Servi Sepeda | |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | UJK BNSP APBN 1. Tribulan I 2. Tribulan III | Motor Tribulan 1 2. Belum terlaksana 3. Belum terlaksana 4. Belum terlaksana | |
| 2 | Melakukan monitoring dan evaluasi LPK | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan | Kabid Pelatihan Kerja | Januari-Desember 2023 | Tribulan III | UJK BNSP APBN 1. Pembuatan Roti dan Kue 1, Tata Rias Pengantin dan Hantaran 1, Plat Welder SMAW 1G Tribulan I 2. Belum terlaksana | |
| 3 | Meningkatkan pembinaan produktifitas tenaga kerja bagi perusahaan kecil | Melaksanakan Bimtek Peningkatan Produktivitas bagi UMKM | Kabid Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas | Januari-Desember 2023 | Tribulan IV | Belum Terlaksana | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|-----------------------|--|---|--|
| 4 | Meningkatkan pembinaan produktifitas tenaga kerja bagi perusahaan kecil | Melaksanakan Bimtek Pengukuran Produktivitas Perusahaan dan Pelaksanaan Monitoring ke Perusahaan Kecil | Kabid Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas | Januari-Desember 2023 | Tribulan III dan Tribulan IV | Belum Terlaksana | |
| 5 | Melakukan pembinaan terhadap perusahaan penerimaan Tenaga Kerja | Melakukan Koordinasi dan Monitoring | Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Januari-Desember 2023 | Tribulan I-IV | Sudah dilaksanakan tiap tribulan | |
| 6 | Menyiapkan sarana aplikasi informasi pasar kerja berbasis online | Pembuatan Aplikasi PELIKET dan Pelaksanaan Bursa Kerja (JMF) serta Pelaksanaan Sosialisasi Bursa Kerja Khusus | Kabid Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas | Januari-Desember 2023 | Pembuatan Aplikasi PLIKET Tribulan III | Belum Terlaksana | |
| 7 | 1. Koordinasi Pemdes, BP2MI dan Aparatur untuk pencegahan PMI Ilegal 2. Koordinasi dengan Direktorat PTKLN | Melakukan Sosialisasi | Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Januari-Desember 2023 | Tribulan II-III | Belum terlaksana | |
| 8 | Melakukan evaluasi atas pembinaan yang diberikan ke perusahaan | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan | Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Januari-Desember 2023 | Tibulan I-IV | Sudah dilaksanakan ketika ada aduan masalah dan diselesaikan secara win win | |

| | | | | | | solution | |
|----|--|---|--|-----------------------|---------------|------------------------------------|--|
| 9 | 1. Melaksanakan mediasi tripartit 2. Mencari penyelesaian secara win win solution | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan | Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Januari-Desember 2023 | Tibulan I-II | Sudah dilaksanakan pada Tribulan I | |
| 10 | Koordinasi dengan Kemendes dan Disnaker Provinsi | Melakukan Koordinasi dan Monitoring | Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Januari-Desember 2023 | Tibulan I-IV | Sudah terlaksana | |
| 11 | 1. Bila ada program pendidikan instruktur di provinsi agar mengikuti 2. Ada penambahan instruktur dan CPNS baru | Evaluasi dan Koordinasi | Kabid Pelatihan Kerja | Januari-Desember 2023 | Tribulan I-IV | Belum terlaksana | |
| 12 | Ada MOU dengan pihak swasta untuk menyediakan sarana dan prasarana agar lulusan dapat link and match dengan dunia Industri dan usaha | Evaluasi dan Koordinasi | Kabid Pelatihan Kerja | Januari-Desember 2023 | Tribulan I-IV | Belum Terlaksana | |
| 13 | Melakukan koordinasi dan monitoring kepada PPTK untuk secepatnya membuat laporan realisasi kinerja | Melakukan Koordinasi, Reviu dan Monev | Sekretaris, Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi | Januari-Desember 2023 | Tribulan I-IV | Sudah dilaksanakan setiap Tribulan | |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--|-----------------------|---------------|--------------------|--|
| 14 | Menghimbau kepada pemegang anggaran untuk secepatnya membuat realisasi laporan terkait rencana kegiatan kedepan | Melakukan Koordinasi dan Monitoring, Reviu RAK dan Anggaran | Sekretaris, Kasubbag Keuangan | Januari-Desember 2023 | Tribulan I-IV | Sudah dilaksanakan | |
| 15 | 1. Bimbingan teknis penyusunan RTK Mikro bagi perusahaan 2. Bekerjasama dengan Disnaker Provinsi | Melakukan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis | Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Januari-Desember 2023 | Tribulan II | Belum terlaksana | |
| 16 | 1. Validasi Perda PTKA pada sistem PTKA Daerah 2. Kerjasama dengan Pengawas Tenaga Kerja | Melakukan Koordinasi dan Monitoring | Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Januari-Desember 2023 | Tribulan I-IV | Sudah dilaksanakan | |

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I, yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan adalah sebagaimana terlampir:

**Formulir Kertas Kerja Monitor Risk Even & RTP
Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lamongan
 Tahun Penilaian : 2023
 Urusan Pemerintahan : Tenaga Kerja
 Dinas Terkait : Dinas Tenaga Kerja

| No | “Risiko” yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Kejadian Risiko | | | Keterangan | RTP | Rencana Pelaksanaan RTP | Realisasi Pelaksanaan RTP | Keterangan |
|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|--|--|------------|--|-------------------------|---|--|
| | | | Tanggal Terjadi | Sebab | Dampak | | | | | |
| Risiko Strategis OPD Dinas Tenaga Kerja: | | | | | | | | | | |
| 1 | Rendahnya Penduduk yang Bekerja | ROO.23.07.33.01 | - | Masih banyaknya Angkatan Kerja yang belum mendapat pekerjaan | Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka | - | 1. Meningkatkan Program Pelatihan yang telah diadakan dan menambah kuota peserta pelatihan 2. Kerjasama dengan OPD Terkait untuk memfasilitasi penduduk yang bekerja 3. Pelaksanaan Job Fair | Januari-Desember 2023 | 1.Tribulan I-IV 2.Tribulan I-IV 3. Tribulan III | Sudah dilaksanakan 1. Pelatihan di Tribulan I 2. Koordinasi dengan OPD Terkait Tribulan I 3. Belum terlaksana |

| Risiko Operasional OPD Dinas Tenaga Kerja: | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---|-------------------|---|---|---|-----------------------|---|
| 1 | Belum Semua Lulusan BLK Bersertifikat Kompetensi | ROO.23.07.33.01 | - | Anggaran Terbatas | Belum Bisa di akui Kompetensi secara Nasional | - | UJK BNSP yang tidak terkafer Dana APBD bisa di usulkan ke dana APBN BPVP Sidoarjo | Januari-Desember 2023 | <p>UJK BNSP APBD 1.Tribulan I 2.Tribulan II 3. Tribulan III 4. Tribulan IV</p> <p>UJK BNSP APBN 1. Tribulan I 2. Tribulan III</p> <p>UJK BNSP APBN 1. Pembuatan Roti dan Kue 1, Tata Rias Pengantin dan Hantaran 1, Plat Welder SMAW 1G Tribulan I 2. Belum terlaksana</p> |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|---|--|---|---|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|--|
| 2 | Belum Terstandarisasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | ROO.23.07.33.02 | - | Minimnya SDM Pengelola, belum adanya anggaran untuk akreditasi | Masih kurangnya pengetahuan untuk memanage lembaga dengan baik | - | Melakukan monitoring dan evaluasi LPK | Januari-Desember 2023 | Tribulan III | Belum Terlaksana | |
| 3 | Terbatasnya Konsultasi Produktifitas Perusahaan Kecil | ROO.23.07.33.03 | - | Minimnya perusahaan kecil mendapatkan konsultasi produktifitas | Rendahnya produktifitas perusahaan kecil | - | Meningkatkan pembinaan produktifitas tenaga kerja bagi perusahaan kecil | Januari-Desember 2023 | Tribulan IV | Belum Terlaksana | |
| 4 | Terbatasnya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten | ROO.23.07.33.04 | - | Minimnya perusahaan kecil yang menerapkan program peningkatan produktifitas | Rendahnya penerapan program peningkatan produktifitas | - | Meningkatkan pembinaan produktifitas tenaga kerja bagi perusahaan kecil | Januari-Desember 2023 | Tribulan III dan Tribulan IV | Belum Terlaksana | |
| 5 | Jumlah Tenaga Kerja Produktif yang Belum Bekerja | ROO.23.07.33.05 | - | Minimnya Informasi Lowongan Kerja | Banyaknya calon tenaga kerja belum terserap | - | Melakukan pembinaan terhadap perusahaan penerimaan Tenaga Kerja | Januari-Desember 2023 | Tribulan I-IV | Sudah dilaksanakan tiap tribulan | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|--|---------------------------------------|---|---|-----------------------|--|--|
| 6 | Rendahnya Kesempatan Kerja | ROO.23.07.33.06 | - | Minimnya fasilitas yang mempertemukan antara perusahaan dan pencaker | Rendahnya penyerapan penempatan kerja | - | Menyiapkan sarana aplikasi informasi pasar kerja berbasis online | Januari-Desember 2023 | Pembuatan Aplikasi PLIKET Tribulan III | Belum Terlaksana, JMF telah dilaksanakan pada Tribulan III |
| 7 | Banyaknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal | ROO.23.07.33.07 | - | Masih adanya PMI Ilegal | Deportasi/Pemulangan | - | 1. Koordinasi Pemdes, BP2MI dan Aparatur untuk pencegahan PMI Ilegal 2. Koordinasi dengan Direktorat PTKLN | Januari-Desember 2023 | Tribulan II-III | Belum terlaksana |
| 8 | Rendahnya Kepatuhan Perusahaan dalam Membuat Peraturan dan Memenuhi Syarat-syarat Kerja | ROO.23.07.33.08 | - | Kurangnya kesadaran perusahaan untuk memahami syarat-syarat kerja | Masih banyak pekerja yang dirugikan | - | Melakukan evaluasi atas pembinaan yang diberikan ke perusahaan | Januari-Desember 2023 | Tibulan I-IV | Sudah dilaksanakan ketika ada aduan masalah dan diselesaikan secara win win solution |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------|---|---|---|---|--|-----------------------|---------------|------------------------------------|
| 9 | Rendahnya Kesadaran Perusahaan memberikan Hak Pekerja sesuai Peraturan Perundang-Undangan | ROO.23.07.33.09 | - | Kurangnya minat Perusahaan untuk belajar tentang Peraturan Perundang-Undangan terbaru khususnya di Bidang Ketenagakerjaan | Muncul aduan karena belum terpenuhinya hak dari pekerja | - | 1. Melaksanakan mediasi tripartit 2. Mencari penyelesaian secara win win solution | Januari-Desember 2023 | Tibulan I-II | Sudah dilaksanakan pada Tribulan I |
| 10 | Tertundanya penempatan calon transmigran | ROO.23.07.33.10 | - | Tertundanya pemberangkatan Caltrans | Panjangnya daftar tunggu Caltrans | - | Koordinasi dengan Kemendes dan Disnaker Provinsi | Januari-Desember 2023 | Tibulan I-IV | Sudah terlaksana |
| 11 | Belum Tersedianya Instruktur | ROO.23.07.33.11 | - | Tidak ada CPNS di tunjukan sebagai instruktur | Masih memakai Instruktur Non ASN | - | 1. Bila ada program pendidikan instruktur di provinsi agar mengikuti 2. Ada penambahan instruktur dan CPNS baru | Januari-Desember 2023 | Tribulan I-IV | Belum terlaksana |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------|----------------------------|---|--|---|--|-----------------------|---------------|------------------------------------|
| 12 | Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pelatihan | ROO.23.07.33.12 | - | Anggaran bersumber dari DBHCHT tidak boleh pembelian alat PMK 215/PMK.07/2021 | 1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada 2. Pakai dana selain DBHCHT (Cukai) | - | Ada MOU dengan pihak swasta untuk menyediakan sarana dan prasarana agar lulusan dapat link and match dengan dunia Industri dan usaha | Januari-Desember 2023 | Tribulan I-IV | Belum terlaksana |
| 13 | Penyampaian dokumen perencanaan dan evaluasi belum tepat waktu | ROO.23.07.33.13 | Tribulan I, II, III dan IV | Data capaian kinerja dan data pendukung laporan tidak segera dikumpulkan di Subbag Perencanaan dan Evaluasi | Penyampaian laporan pertanggungjawaban Perangkat Daerah tidak tepat waktu | - | Melakukan koordinasi dan monitoring kepada PPTK untuk secepatnya membuat laporan realisasi kinerja | Januari-Desember 2023 | Tribulan I-IV | Sudah dilaksanakan setiap Tribulan |
| 14 | Penyusunan laporan keuangan tidak tepat waktu | ROO.23.07.33.14 | - | Karena adanya perubahan peraturan dari Pusat serta Penundaan pembayaran belanja kegiatan | Laporan penyusunan dokumen administrasi keuangan perlu direview serta mempengaruhi proses pencairan Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten | - | Mengimbau kepada pemegang anggaran untuk secepatnya membuat realisasi laporan terkait rencana kegiatan kedepan | Januari-Desember 2023 | Tribulan I-IV | Sudah dilaksanakan |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------|---|---------------------------------|--|---|---|-----------------------|---------------|--------------------|
| | | | | | Lamongan | | | | | |
| 15 | Perusahaan belum melakukan/mela porkan RTK mikro | ROO.23.07.33.15 | - | Belum tersusunnya RTK | Lowongan Tenaga Kerja belum terintegrasi | - | 1. Bimbingan teknis penyusunan RTK Mikro bagi perusahaan 2. Bekerjasama dengan Disnaker Provinsi | Januari-Desember 2023 | Tribulan II | Belum terlaksana |
| 16 | Penggunaan TKA menjadi Retribusi Daerah jika dengan Perpanjangan IMTA | ROO.23.07.33.16 | - | Belum Optimalnya alih teknologi | Ketergantungan terhadap TKA | - | 1. Validasi Perda PTKA pada sistem PTKA Daerah 2. Kerjasama dengan Pengawas Tenaga Kerja | Januari-Desember 2023 | Tribulan I-IV | Sudah dilaksanakan |

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan antara lain:

- Kurangnya pemahaman terkait kegiatan pengelolaan risiko;
- Belum maksimalnya monitoring dan evaluasi kegiatan.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada tribulan I dapat dianalisa bahwa diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode tribulan berikutnya sehingga risiko pada kegiatan dapat diidentifikasi lebih dini dan terselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I dapat simpulan bahwa pemantauan dan evaluasi atas pengendalian resiko pada dasarnya bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang ditetapkan telah berjalan efektif dalam mengatasi resiko. Tindakan pengendalian diperlukan evaluasi sebagai tindaklanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan pemantauan berkelanjutan atas pelaksanaan rencana tindak pengendalian yang telah ditetapkan apakah telah berjalan secara efektif guna mencapai tujuan organisasi.